

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Ditinjau dari judul yang diteliti, berikut beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan oleh peneliti, hal ini dapat menunjukkan orisinalitas dan posisi penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa penelitian tidak dapat diakses secara publik (belum terpublikasi). Penelitian tersebut antara lain tersaji berupa jurnal maupun skripsi, sebagai berikut:

- 2.1.1 Peran Kampung Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Reno Febriyandana Pratama, 2015, Universitas Muhamadiyah Malang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor mengenai peran Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana yang ada. Peran kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana memanglah sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat. Karena dengan adanya Kampung Siaga Bencana dapat mengurangi dan membantu dalam proses mitigasi dan tanggap bencana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan meningkatkan peran kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana di. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik keabsahan data menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai peran kampung siaga bencana sudah sangat baik dalam ketiga aspek yaitu dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

### 2.1.2 Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan, Astina Wati, 2018, Universitas Brawijaya

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya bencana banjir yang melanda daerah yang rawan bencana banjir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai mitigasi bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat. Fokus penelitian yaitu: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis mitigasi penanggulangan banjir berbasis partisipasi masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 2) Mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi penanggulangan bencana banjir. Hasil dari penelitian ini adalah program-program mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diantaranya : Pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Sosialisasi Kepada semua lapisan masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Koordinasi dengan semua lapisan masyarakat.

### 2.1.3 Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam untuk Mengurangi Risiko Bencana Tanah Longsor Dikecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Muhammad Farhan Haikal, 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam dalam mengurangi risiko bencana tanah longsor serta

faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara semistruktur untuk menanyakan terkait dengan partisipasi masyarakat mengenai mitigasi bencana tanah longsor, informan penelitian menggunakan metode purposive Sampling yang menjadi informan yaitu staf desa setempat yang berada di Kecamatan Megamendung dan masyarakat Megamendung, hasil yang ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor terbagi menjadi empat 4 tahapan yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pemanfaatan Hasil dan Tahap Evaluasi, sedangkan terdapat faktor pendukung yaitu dengan adanya Desa Tangguh Bencana (Destana), adanya kekompakan dari masyarakat dalam melaksanakan kerja bakti serta keaktifan dalam Sosialiasi sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana alam yaitu kurangnya komunikasi kepada masyarakat terkait terjadinya bencana dan kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat saat ada masyarakat lain yang terdampak tanah longsor.

Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reno Febriyandana Pratama, 2015, Universitas Muhamadiyah Malang	Peran Kampung Siaga Bencana dalam Mitigasi Bencana di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Teori Kampung Siaga Bencana	1. Lokasi penelitian di Desa Sukomulyo 2. Pembahasan mengenai peran KSB
2.	Astina Wati, 2018, Universitas Brawijaya	Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Babat Kabupaten Lamongan	1. Teori Mitigasi Bencana	1. Lokasi penelitian di Kelurahan Babat 2. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan analitik
3.	Muhammad Farhan Haikal, 2022, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Untuk Mengurangi Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor	1. Teori Mitigasi bencana 2. Pembahasan Mitigasi Bencana Tanah Longor	1. Lokasi penelitian di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor

Kebaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas yaitu yang pertama mengenai mitigasi bencana tanah longsor pada kampung siaga bencana dan berorientasi kepada bagaimana proses Kampung Siaga Bencana dalam menjalankan perannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan mitigasi bencana. Selain itu penelitian ini berfokus kepada tiga aspek utama dalam mitigasi bencana yaitu pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan yang ada di Desa Kalitlaga Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara.

Persamaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selain itu juga tentang bagaimana peneliti terdahulu membahas tentang mitigasi bencana dan Kampung Siaga Bencana dalam proses kebencanaan. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu dalam aspek pembahasan dan lokasi penelitian, penelitian ini membahas tentang pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan pada Kampung Siaga Bencana Pasanggiri Desa Klaitlaga.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan tentang Mitigasi Bencana**

#### **1. Definisi Mitigasi Bencana**

Definisi mitigasi bencana menurut Joko, (2011: 279). "Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana."

Mitigasi sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9) (Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6).

Pengertian mitigasi menurut Giri, (2017 : 15) dalam buku tanggap darurat bencana alam. “Mitigasi bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda”. Dari pengertian ini, mitigasi bencana merupakan upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu bencana guna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 yang berkaitan dengan mitigasi bencana diantaranya:

1) Kebijakan Mitigasi Bencana.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain :

- a) Setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
- b) Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.

- c) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat di minimalkan.
- d) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

## 2) Strategi Mitigasi Bencana

Pelaksanaan kebijakan dapat dikembangkan dengan beberapa strategi sebagai berikut :

### a) Pemetaan.

Strategi pemetaan sangat berguna bagi pengambilan keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah :

- 1) Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan.
- 2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
- 3) Peta bencana belum terintegrasi.
- 4) Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda-beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

### b) Pemantauan.

Pengetahuan mengenai tingkat keraanan secara dini dapat dilakukan dengan melalui antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Sehingga akan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategic secara jasa dan ekomomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

c) Penyebaran Informasi.

Penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan poster bagi seluruh warga sekolah tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di suatu kawasan tertentu.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan.

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh warga sekolah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, sesuatu yang perlu dihindari dari daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

e) Pelatihan/ Pendidikan.

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan pelatihan lebih ditekankan pada alur petugas lapangan hingga warga sekolah sampai pada tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana agar dapat membentuk tingginya kesiapan dalam menghadapi suatu bencana.

f) Peringatan Dini.

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi



bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dengan tujuan memberikan kesadaran dalam menghindari suatu bencana.

### **2.2.2 Tinjauan tentang Tanah Longsor**

Longsoran atau gerakan massa erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi secara ilmiah pada suatu bentang alam. Bentang alam merupakan suatu bentukan alam pada permukaan bumi misalnya bukit, perbukitan, gunung, pegunungan, dataran dan cekungan (Dwikorita, 2005). Tanah Longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda daerah tropis basah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan massa tidak hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara tidak langsung yang melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah bencana dan sekitarnya (Hardiyatmo, 2006).

#### **1. Pengertian Tanah Longsor**

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Berikut beberapa dari tokoh yang telah dipublikasikan di beberapa pustaka:

- 1) Varnes (1978) mengusulkan terminologi gerakan lereng yang dianggap lebih tepat untuk mendefinisikan longsor, yaitu sebagai gerakan material penyusun lereng ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi bumi.
- 2) Arsyad (1989) mengemukakan bahwa longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Dalam hal ini lapisan yang terdiri dari tanah liat atau mengandung kadar tanah liat tinggi dan dapat juga berupa lapisan batuan seperti napal liat (*clay shale*) setelah jenuh air akan bertindak sebagai peluncur.
- 3) Cruden (1991) mengatakan longsor sebagai pergerakan tanah suatu massa batuan, tanah, atau bahan rombakan material penyusun lereng (yang merupakan percampuran tanah dan batuan) menuruni lereng.
- 4) Dwikorita (2005) longsor adalah gerakan menuruni atau keluar lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng ataupun percampuran keduanya sebagai bahan rombakan, akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunnya.

## 2. Penyebab Terjadinya Tanah Longsor

Menurut Nandi (2007) dalam Buku Longsor faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng yang mengakibatkan terjadinya longsor. Faktor - faktor tersebut semacam kondisi-kondisi geologi dan hidrografi, topografi, iklim dan perubahan cuaca. Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Terdapat

beberapa faktor penyebab tanah longsor, diantaranya yaitu:

### 1. Jenis Tanah

Jenis tanah juga mempengaruhi penyebab terjadinya longsor. Tanah yang mempunyai tekstur renggang, lembut yang sering disebut tanah lempung atau tanah liat dapat menyebabkan longsor. Apa lagi ditambahkan pada saat musim penghujan kemungkinan longsor akan lebih besar pada tanah jenis ini. Hal ini dikarenakan ketebalan tanah tidak lebih dari 2,5 m dengan sudut lereng 22 derajat. Selain itu kontur tanah ini mudah pecah jika udara terlalu panas dan menjadi lembek jika terkena air yang mengakibatkan rentan pergerakan tanah.

### 2. Curah Hujan

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah.

### 3. Kemiringan Lereng

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Kecuraman lereng 100 persen sama dengan kecuraman 45 derajat. Selain memperbesar jumlah aliran permukaan, makin curam lereng juga memperbesar kecepatan aliran permukaan, dengan itu memperbesar energi angkut air.

Klasifikasi kemiringan lereng untuk pemetaan ancaman tanah longsor dibagi dalam lima kriteria diantaranya yaitu lereng datar dengan kemiringan 0-8%, landai berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8-15%, agak curam berbukit dengan kemiringan 15-25%, curam sampai sangat curang 25- 40%, sangat curam dengan kemiringan >40%. Wilayah yang kemiringan lereng antara 0-15% akan stabil terhadap kemungkinan longsor, sedangkan di atas 15% potensi untuk terjadi longsor pada kawasan rawan gempa bumi semakin besar.

### 4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan (*land use*) adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Permukiman yang menutupi lereng dapat mempengaruhi penstabilan yang negatif maupun positif. Sehingga tanaman yang disekitarnya tidak dapat menopang air dan meningkatkan kohesi tanah, atau sebaliknya dapat memperlebar keretakan dalam permukaan baruan dan meningkatkan peresatan.

Penggunaan lahan seperti persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.

#### 5. Getaran

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.

#### 6. Susut muka air danau atau bendungan

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk  $220^\circ$  mudah terjadi longsor dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan.

#### 7. Adanya beban tambahan

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.

#### 8. Pengikisan/erosi

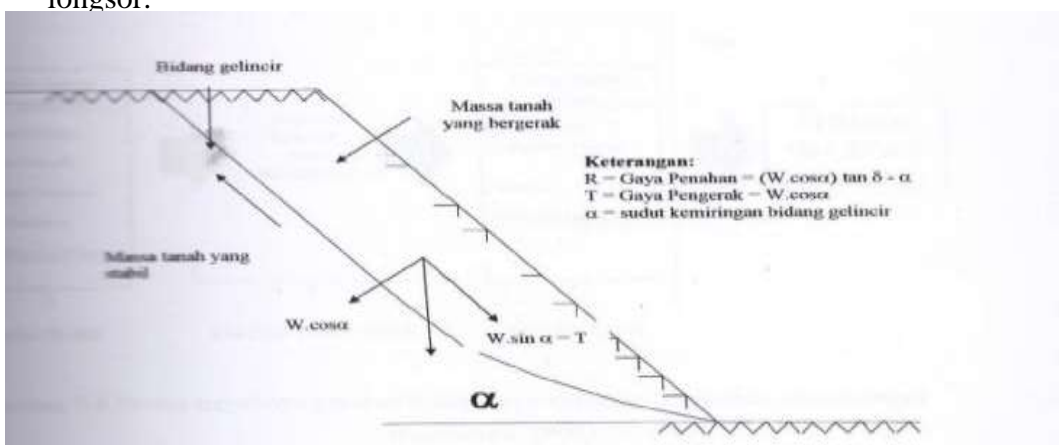
Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu akibat penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal.

## 9. Adanya material timbunan pada tebing

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

Tanah Longsor terjadi jika dipenuhi tiga keadaan, yaitu:

1. Kelerengan yang curam,
2. Terdapat bidang peluncur di bawah permukaan tanah yang kedap air,
3. Terdapat cukup air (dari hujan) di dalam tanah di atas lapisan kedap, sehingga tanah jenuh air. Air hujan yang jatuh dari di atas permukaan tanah kemudian menjenuhi tanah sangat menentukan kestabilan lereng, yaitu menurunnya tanah sangat menentukan kestabilan lereng, menurunnya ketahanan geser tanah ( $t$ ) yang jauh lebih besar dari penurunan tekanan geser tanah ( $s$ ), sehingga faktor keamanan lereng ( $F$ ) menurun tajam ( $F=t/s$ ), menyebabkan lereng rawan longsor.

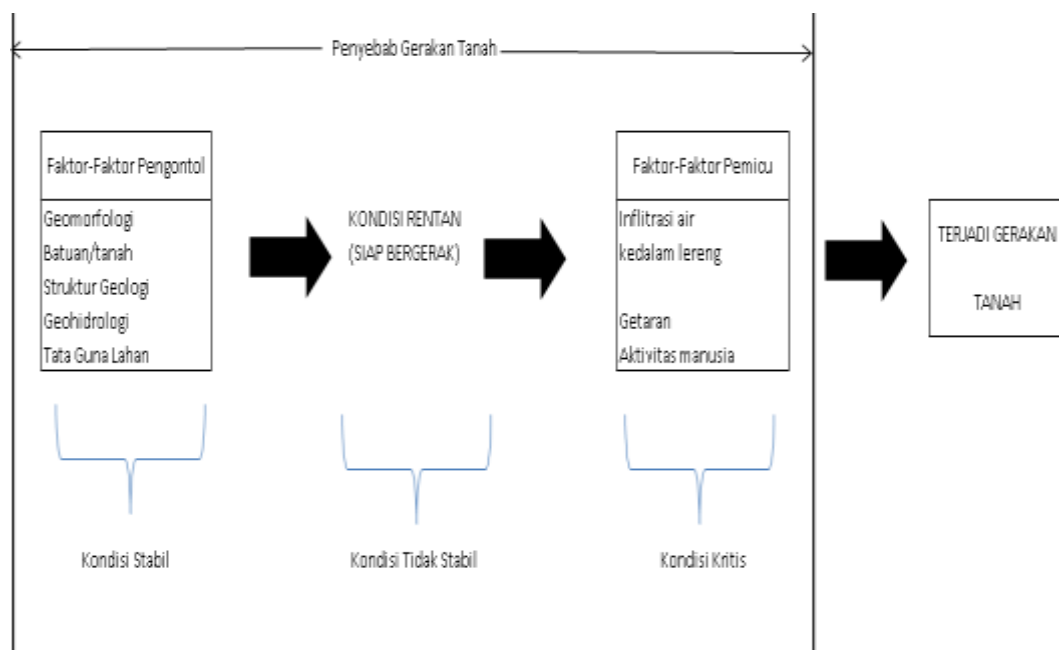


Gambar 2.1 Gaya-gaya yang mengontrol kestabilan suatu lereng (Karnawati, 2005)

### 3. Proses Terjadinya Tanah Longsor

Menurut Karnawati (2005) pergerakan massa anah/batuan pada lereng dapat terjadi akibat interaksi pengaruh antara beberapa kondisi yang meliputi geologi, morfologi, struktur geologi, hidrogeologi dan tata guna lahan. kondisi- kondisi tersebut saling berpengaruh sehingga mewujudkan suatu kondisi lereng yang mempunyai kecenderungan atau berpotensi untuk bergerak. Kondisi lereng demikian disebut kondisi rentan untuk bergerak. Jadi, pengertian rentan disini berarti berpotensi atau kecenderungan untuk bergerak namun belum mengalami gerakan.

Proses dan tahapan terjadinya gerakan tanah secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Proses terjadinya gerakan tanah dan komponen-komponen penyebabnya (Karnawati, 2005)

Dari Gambar 2.2 dijelaskan bahwa terjadinya proses gerakan tanah melalui beberapa tahapan, yaitu: Tahap stabil, Tahap rentan, Tahap kritis, dan Tahap benar-benar bergerak.

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa penyebab gerakan tanah dapat dibedakan faktor pengontrol (faktor-faktor yang mengkondisikan suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak). Penyebab langsung yang berupa pemicu yaitu proses-proses yang merubah kondisi lereng dari kondisi rentan atau siap bergerak menjadi kondisi benar-benar bergerak setelah melampaui kondisi kritis.

Menurut proses terjadinya (Swanston dan Swanson, 1980) tanah longsor dikelompokkan menjadi jatuhan, longsor, aliran, rayapan, dan bandang. Masing-masing tipe terjadi pada medan dengan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, hal ini karena bencana tanah longsor disebabkan oleh beberapa faktor.

Tabel 2.1 Klasifikasi Longsor

<b>Jenis</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Terbentuk Oleh</b>	<b>Penyebab</b>
Jatuhan ( <i>falls</i> )	Gerakan udara; melambung, memutar, menggelinding, sangat cepat	Pengangkatan atau lereng, curam, patahan batuan, kurangnya ketahanan vegetasi	Pemindahan daya dukung, penjepit dan pengumpul, gempa, kelebihan beban
Longsor ( <i>slide</i> )	Material yang Bergerak tidak Banyak berubah bentuk; bergerak sepanjang bidang luncur; lambat-cepat	Zona massif di atas zona lunak, adanya lapisan dasar yang kedap, buruknya sedimentasi, atau sedimen yang tak terkonsolidasi	Terlalu curam, Penurunan friksi internal



Jenis	Deskripsi	Terbentuk Oleh	Penyebab
Aliran ( <i>flows</i> )	Bergerak dalam bentuk cairan lumpur; lambat- cepat	Bahan tak terkonsolidasi, perubahan permeabilitas, sedimen halus yang kedap pada batuan dasar	Penurunan friksi Internal karena kandungan air
Rayapan ( <i>creep</i> )	Gerakan lambat ke arah lereng bawah; beberapa cm/thn	Tingginya perubahan temperatur harian, perubahan period kering-hujan, siklus kembang-kerut	Goyangan pohon, penjepit dan pengumpul, pemotongan tebing atau erosi jurang
Bandang ( <i>debris, torrents</i> )	Gerakan cepat dari yang bermuatan tanah, batu dan material organik di saluran sungai	Saluran curam, lapisan tipis dari material yang tak terkonsolidasi di atas batuan induk didalam saluran, lapisan partikel-partikel liat dari bidang luncur jika basah	Debit aliran tinggi, tanah jenuh air, sering tandai oleh longsor tanah/batu, penggundulan hutan

Sumber: Swanston dan Swanson (1980)

### 2.2.3 Tinjauan tentang Penanggulangan Bencana

#### 1. Pengertian Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Serta kegiatan tanggap bencana pada saat sebelum, sedang, dan sesudah terjadinya bencana yang mencakup pencegahan bencana, imitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kondisi akibat dampak bencana.

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitas”. Rumusan penanggulangan bencana menurut Undang Undang tersebut memiliki dua pengertian dasar yaitu :

- a. Penanggulangan bencana sebagai rangkaian atau siklus.
- b. Penanggulangan bencana dimulai dari penetapan kebijakan pembangunan yang berawal dari resiko bencana dan diikuti oleh tahap kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi penanggulangan bencana.

## 2. Filosofi Penanggulangan Bencana

Dalam menghadapi bahaya atau ancaman secara filosofis dapat dilakukan dengan cara;

- a. Menjauhkan bahaya atau ancaman bencana

Menjauhkan manusia dari ancamamn bencana dapat dilakukan dengan cara relokasi. Dimana nantinya kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pendekatan sosial yang tepat. Cara ini bisa berhasil maupun tidak berhasil, karena sangat sulit untuk memindahkan manusia dari lingkungannya yang sudah menjadi satu kesatuan.

- b. Menjauhkan bahaya atau ancaman dari manusia

Mencegah timbulnya bahaya suatu ancaman dari manusia memerlukan usaha yang sangat besar. Dalam kasus bencana alam seperti gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi tampaknya akan tidak mudah dan kadang tidak mungkin dilakukan.

### c. Belajar dari pengalaman

Masyarakat selalu berusaha untuk mendapatkan cara yang paling bijak untuk melawan hingga menghindari bencana dan mengadaptasi terhadap bahaya yang mengancamnya. Dengan hal ini masyarakat mendapatkan pelajaran maupun pengalaman, kemudian masyarakat menemukan kearifan lokal yang sangat spesifik dalam menghadapi ancaman bencana.

### d. Hidup Harmonis dengan Resiko (*Living harmony with risk*)

Dalam kondisi ini, harus dapat mengenal karakter dan sifat alam, agar dapat menyesuaikan setiap perilaku alam. Mengetahui karakter dan sifat alam ini dilakukan dengan awal memahami proses dinamikanya, waktu kejadiannya, dan dampak yang ditimbulkan. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk bisa mengatasi dan mengadaptasi kondisi alam sekitar (Andri Sulistyono, S.O.R., 2007).

## 3. Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah suatu proses yang dinamis, terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas serta langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

### a. Kebijakan Manajemen

Menurut Sang Gede Purnama (2017) kebijakan manajemen bencana harus dikembangkan melalui proses yang jelas dan benar seperti pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta alokasi sumber daya yang tepat antara Pemerintah Pusat, Daerah dan berbagai fungsi yang terlibat. Dalam penetapan kebijakan manajemen bencana adapun beberapa proses umum yang

terjadi yaitu :

- 1) Penetapan agenda
- 2) Pengambilan keputusan
- 3) Formulasi kebijakan
- 4) Implementasi kebijakan
- 5) Evaluasi kebijakan<sup>3</sup>

b. Tujuan Manajemen Bencana

- 1) Menghilangkan kesengsaraan serta kesulitan bagi korban
- 2) Mengurangi kerusakan dan kerugian yang lebih lanjut
- 3) Meletakkan dasar yang perlu diperlukan guna pelaksanaan rehabilitas dan rekontruksi dalam konteks pembangunan
- 4) Mencegah jumlah korban serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup
- 5) Mengembalikan korban dari pengungsian untuk dipindahkan kelokasi baru yang layak huni atau dapat kembali ke daerah asal apabila daerah tersebut masih layak untuk dihuni
- 6) Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.

Manajemen Bencana dan tindakan antisipasinya yaitu melalui syarat yang mutlak untuk dapat hidup yang berdampingan dengan bencana alam. Maka dari itu perlu adanya *political will* pemerintah untuk segera memprioritaskan program manajemen bencana serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (Riny Handayani, 2011). Manajemen bencana merupakan kegiatan yang meliputi aspek aspek

perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana yang dikenal dengan siklus bencana. Berikut gambaran dari siklus manajemen bencana

#### **2.2.4 Tinjauan tentang Peningkatan Kapasitas**

Kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan Morgan (2006) merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu (Anni Milen, 2004:12).

UNDP (*United Nations Development Program*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) dalam Milen (2006) memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk:

1. Menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan
2. Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan (Anni Milen, 2004:15).

Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle (1997) yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable*. Bahkan Grindle menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada *improvement in the ability of public sector organizations*. Keseluruhan definisi di atas, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek sebagai berikut (Hardjnto, 2006:8).

1. Bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses,
2. Bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi atau organisasi, dan
3. Bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

Sesungguhnya pada beberapa literatur pembangunan, konsep *capacity building* sampai saat ini masih menyisakan perdebatan-perdebatan dalam pendefinisian. Sebagian pakar memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara pakar yang lain lebih merujuk kepada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).

Namun Soeprato tidak condong pada salah satu sisi karena menurutnya keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni analisa kapasitas sebagai inisiatif lain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan (*government*

*performance*). Dalam hal ini searah dengan pendapat Grindle (1980) pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcomes*; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. (Hardjnto,2006:10).

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle (1980) adalah:

1. Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen,
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Sejalan dengan itu, Grindle (1980) menyatakan bahwa apabila *capacity building* menjadi serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas, maka *capacity building* tersebut harus

memusatkan perhatian kepada dimensi: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis.

Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (*training*), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistim rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistim manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro.

Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistim insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan reformasi kelembagaan, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistim dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro. Dalam konteks ini aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan aturan main dari sistim ekonomi dan politik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistim kelembagaan yang dapat mendorong pasar dan berkembangnya masyarakat madani.

Jika kita dalam semua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas adalah proses yang dialami oleh individu, kelompok dan organisasi untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Dari pengertian ini kita dapat memberi penekanan pada dua hal penting:



1. Peningkatan kapasitas sebagian besar berupa proses pertumbuhan dan pengembangan internal, dan
2. Upaya upaya peningkatan kapasitas haruslah berorientasi pada hasil.

### **2.2.5 Tinjauan tentang Kesadaran**

#### 1. Definisi Kesadaran

Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Alam sadar adalah alam yang berisi hasil-hasil pengamatan kita kepada dunia luar (Maramis, 2015). Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan dari lingkungan.

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi kesadaran dalam *combridge internasional dictionary of English* (2014), antara lain: pertama, tahu dan mampu mengekspresikan dampak dari suatu perilaku. Kedua, tahu dan mampu mengekspresikan tentang berbagai penyelesaian. Ketiga, memahami perlunya langkah penelitian sebagai bekal pengambilan keputusan. Keempat, memahami pentingnya kerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dalam psikologi, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*).

Penumbuhan tingkat kesadaran yang tinggi pada pertolongan pertama merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam lingkungan pendidikan, hal ini bermaksud untuk mencapai tujuan utama untuk memberikan pertolongan pertama yaitu untuk menyelamatkan hidup, untuk mencegah memburuknya kondisi dan 11 cedera lebih lanjut, untuk mencegah kondisi yang dapat meningkatkan cedera asli,

sehingga korban berada pada posisi yang benar saat di rujuk ke rumah sakit.

## 2. Klasifikasi Kesadaran

Ada dua jenis klasifikasi kesadaran diantaranya:

### a. Kesadaran magis

Kesadaran magis merupakan kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat dan mengidentifikasi kaitan antara satu factor pembentuk realitas dengan factor yang lain. Manusia menyerah pada kemampuannya melawan realitas yang menindas. Mereka tidak dapat mengetahui segala macam bentuk perubahan yang terjadi pada orang lain. Manusia hanya pasrah dan tunduk pada yang ada di sekitarnya. Mereka tidak memiliki kesadaran atau tuntutan untuk melakukan tindakan perlawanan atas realitas yang membelenggu. Manusia pada kesadaran magis dapat dikatakan sebagai manusia pasif yang hanya menerima realitas.

Orang-orang dalam fase kesadaran magis menyesuaikan diri dengan kehidupan tempat tinggalnya. Mereka mendefinisikan masalah dengan mengkaitkannya pada persoalan-persoalan cara bertahan hidup dan merasa masalah-masalah ini disebabkan oleh kekuasaan-kekuasaan yang di luar jangkauan mereka. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan terentang sejak dari menerima keadaan secara pasif sampai menggulingkan kekuasaan-kekuasaan yang mereka anggap membelenggu kehidupan mereka (Smith, 2010).

### b. Kesadaran Naif

Pada tingkatan kesadaran naif, manusia memiliki peran sebagai penyebab utama terjadinya realitas. Etika, kreativitas, dan kebutuhan akan kesuksesan dianggap sebagai penentu perubahan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat

dianggap sebagai kesalahan masyarakat tersebut. Masyarakat menganggap sistem dan struktur yang ada sudah baik dan benar serta hal tersebut merupakan faktor given, maka tidak perlu tindakan kritis untuk mempertanyakannya lagi. Individu tertindas ingin memperbaharui sistem yang telah dirusak oleh orang-orang jahat yang telah melanggar norma dan aturan.

Pada tingkatan kesadaran ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan sub kesadaran, antara lain:

- 1) Subkesadaran pertama, individu-individu menyalahkan diri mereka sendiri dan kawan-kawannya, karena dianggap telah melanggar norma sehingga memunculkan perasaan bersalah kemudian mengarah pada tindak kekerasan horizontal. Tindakan-tindakan mereka diarahkan mengubah diri mereka sendiri dan meniru penindas untuk lebih berpendidikan dan berkuasa.
- 2) Subkesadaran kedua, individu-individu tertindas menyalahkan individu penindas atau kelompok penindas tertentu, karena melanggar norma-norma yang ada. Mereka mengetahui bagaimana maksud dan betapa kasarnya perilaku penindas, tetapi mereka menimpakan penyebab persoalan ini pada individu penindas. Tindakan-tindakan mereka diarahkan untuk mempertahankan diri dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma individu penindas (Smith, 2010).

#### c. Kesadaran kritis

Puncak kesadaran manusia, yaitu kesadaran kritis merupakan titik tolak pemikiran Freire. Kesadaran ini melihat realitas secara sinergis antara manusia dan alam. Struktur dan sistem sosial menjadi sumber masalah yang diangkat oleh

manusia yang mencapai kesadaran ini. Pendekatan struktural menghindari blaming the victim dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Individu-individu yang berkesadaran kritis menganggap pentingnya transformasi atas sistem sosial yang menindas (Smith, 2010).

Akan tetapi, mengubah realitas secara mendasar tidak cukup dengan melakukan tambal-sulam terhadap hubungan antara penindas dan tertindas, karena penyebab penindasan ini adalah sistem, yakni seperangkat norma yang menguasai kaum tertindas dan penindas. Proses transformasi ini dimulai dengan menolak dan menyingkirkan ideologi penindas dan meningkatnya penghargaan terhadap diri sendiri dan kekuatan komunitas. Mereka berpikir secara ilmiah dan tidak lagi merujuk pada kasus-kasus penindasan, tetapi pada wilayah sosial-ekonomi makro tempat kehidupan berjalan dalam konteks global. Individu-individu yang kritis mulai mencari model-model peran baru mengandalkan kekuatan diri dan sumber-sumber daya komunitas, keberanian mengambil risiko, dan independen terhadap penindas. Pendekatan baru dalam memecahkan masalah ini, yaitu polemik diganti dialog dengan kawan-kawannya menyebabkan individu tertindas harus memformulasikan tindakantindakannya sendiri (Hastjarjo, 2015).

### 3. Macam-macam Kesadaran

Terdapat 2 macam kesadaran menurut (Marliani, 2010) yaitu:

#### a. Kesadaran pasif

Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal

maupun eksternal.

#### b. Kesadaran aktif

Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitikberatkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus-stimulus yang diberikan.

#### 4. Faktor-faktor Pembentuk kesadaran

Terdapat 3 faktor-faktor pembentuk kesadaran diri yaitu menurut (Al-ulum, 2013)

##### a. Sistem nilai (value system)

Prinsip awal yang dibangun adalah manusia berfokus pada factor-faktor nonmaterial dan hanya bersifat normatif semata. Artinya dalam prinsip ini, unsur pembentukan kesadaran lebih dari mengarahkan kepada unsur kewajiban. Dalam system nilai terdapat 3 komponen yaitu:

##### 1. Reflek hati nuraini

Dalam psikologi identik dengan intropeksi diri atau evaluasi diri yaitu menganalisis dan menilai diri lewat data-data dan sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar pribadi, sehingga didapatkan gambaran pribadi.

##### 2. Harga diri

Mengutip definisi yang disebutkan dalam kamus ilmiah populer, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat, pangkat, prestise, gengsi yang dimiliki seorang pribadi dan diakui oleh orang lain (masyarakat) terhadap status dan kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan. Teori kepribadian humanistic, pelopornya Abraham H. Maslow

menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun secara hierarki (bertingkat) dan diperinci kedalam lima tingkat kebutuhan:

- a) Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis.
- b) Kebutuhan akan rasa aman.
- c) Kebutuhan akan cinta dan memiliki
- d) Kebutuhan rasa harga diri.
- e) Kebutuhan akan aktualisasi diri.

### 3. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Merupakan jalan ruhani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran terhadap diri. Menurut M. Iqbal, takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw, artinya, pribadi bersifat hidmat (bijaksana dalam bertindak), nikmat (kerja keras), istiqbal (kuat dan terpadu) dan sabar (menjalankan perintah-Nya, menjauhib laranganNya dalam menghadapi cobaan yang ada. Dari sistem nilai yang tergabung, pribadi akan menentukan sebuah kepercayaan diri yang kuat dalam berkehendak dan berbuat, sehingga manusia, sebagai kesatuan jiwa-badan, mampu menangkap seluruh realitas, materi dan non-materi, karena didalam sistem nilai terdapat potensi epistemologis berupa serapan pancaindra, kekuatan akal dan intiuisi yang akan melahirkan kesadaran diri pada diri manusia.

#### c. Cara pandang (attitude)

Perilaku manusia sangat ditentukan oleh cara pandangnya tentang realitas di sekitarnya. Cara pandang dibangun oleh nilai-nilai, keutamaan, prinsip hidup yang diyakini seseorang. Cara pandang terbentuk lewat proses pembelajaran yang

dilalui oleh seseorang sepanjang hidupnya. Berbagai institusi sosial -termasuk agama- sangat membantu mengarahkan proses pembelajaran dan pembentukan cara pandang ini. Attitude menjadi salah satu unsur pembentuk kesadaran diri. Didalamnya terdapat dua komponen pembentuk berupa:

#### 1. Kebersamaan

Sebagai makhluk sosial, unsur kebersamaan dan bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu. Dalam upaya pembentukan kesadaran diri, unsur kebersamaan dengan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Didalam kebersamaan yang dilakukan oleh pribadi, didapatkan dua buah unsur pembentuk kesadaran diri berupa:

- a. Penilaian orang lain terhadap diri (kelebihan dan kekurangan diri)
- b. Keteladanan dari orang lain. 17 Unsur interaksi sosial yang terjalin di masyarakat dan penilaian orang lain terhadap diri sangat mempengaruhi pembentukan kesadaran diri pada manusia.

#### 2. Kecerdasan

Dalam upaya pembentukan pribadi yang berkualitas, terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yang kuat yaitu kecerdasan hidup. Indikasi adanya kecerdasan hidup pada diri manusia itu berupa: Rasa percaya diri dalam memegang prinsip hidup yang diiringi dengan kemandirian yang kuat dan mempunyai visi untuk lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

#### d. Perilaku (behavior)

Keramahan yang Tulus dan Santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapat tempat di hati kita yang termasuk kategori pribadi yang sadar terhadap diri pribadi adalah jika individu bersikap baik (ramah) terhadap orang lain. Dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreatifitas dan kelincahan dalam bertindak, ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah.

#### 5. Indikator Kesadaran

Menurut (Soekanto, 2013) menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, pola perilaku (tindakan).

(Priyono, 2015) mengemukakan, *awareness of environmental issues means being environmentally knowledgeable and understanding the informed actions required for finding the solutions to the issues*. Jadi, dari teori di atas dapat dijelaskan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang Psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan (Atkinson dkk, 2010). Sedangkan dalam teori konsientisasi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap, juga menyebutkan indikator regulasi atau peraturan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan menggunakan teori (Benyamin Bloom, 2008) yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain,



yakni: kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

### **2.2.6 Tinjauan tentang Kampung Siaga Bencana (KSB)**

#### **1. Pengertian Kampung Siaga Bencana**

Penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan upaya terorganisir atas kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang dimulai dari sebelum, pada saat dan sesudah bencana dengan cara mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal baik berbentuk sumber daya manusia yang terlatih (*skilled*), alam dan sarana dan prasarana yang ada pada masyarakat tersebut dengan tujuan mengurangi risiko/dampak yang mungkin timbul akibat peristiwa bencana.

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah suatu model penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial bersama dengan masyarakat untuk mewadahi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat, dibentuk di daerah rawan bencana dengan cara melibatkan seluruh elemen yang ada pada masyarakat.

Prinsip utama pelaksanaan Kampung Siaga Bencana adalah mengutamakan kemandirian masyarakat. Namun demikian, dukungan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penanggulangan seperti pemerintah dan pihak swasta masih tetap dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan bencana ataupun korban bencana merupakan amanat Undang-Undang Nomor

24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Uundang Nomor. 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Beberapa alasan pentingnya penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah:

- a. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak, bukan pemerintah saja
- b. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan dan keamanan dari bencana.
- c. Masyarakat adalah sasaran pihak pertama yang langsung berhadapan dengan ancaman dan bencana. Karena itu kesiapan masyarakat menentukan besar kecilnya dampak bencana di masyarakat.
- d. Masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupannya.
- e. Masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif.
- f. Masyarakat adalah pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana.
- g. Masyarakat yang menghadapi bencana adalah korban yang harus siap menghadapi kondisi akibat bencana.

## 2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kampung Siaga Bencana

### 1) Maksud

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko dan ancaman bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan penanggulangan

bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

## 2) Tujuan

- a. Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
- b. Membentuk jejaring masyarakat siaga bencana berbasis masyarakat di seluruh Indonesia;
- c. Mengorganisir potensi masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;
- d. Memberikan kepastian bahwa penanggulangan bencana berbasis masyarakat berjalan berkesinambungan mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah bencana;
- e. Memperkuat solidaritas inter dan antar anggota masyarakat;
- f. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakat dalam penanggulangan bencana.

## 3). Sasaran

Sasaran Kampung Siaga Bencana adalah masyarakat yang berada di daerah rawan, dan berisiko terhadap bencana.

## 3. Prinsip Kampung Siaga Bencana

Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) memiliki beberapa prinsip utama diantaranya :

### 1) Kesukarelaan

Tim Kampung Siaga Bencana dalam menjalankan programnya bersifat sukarela, bertujuan semata untuk kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan

kegiatan politik tertentu.

2) Kerja sama

Kegiatan yang ada dalam Kampung Siaga Bencana baik bersifat kedalam dan keluar yang dilaksanakan sebelum, pada saat dan paska bencana mengedepankan kerja sama dan keterpaduan.

3) Akuntabilitas

Kegiatan Kampung Siaga Bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah bencana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4) Partisipasi

Kegiatan KSB melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

5) Menghargai dan menghormati nilai-nilai lokal

Kegiatan penanggulangan bencana menghargai nilai-nilai setempat yang telah berlaku dalam menanggulangi masalah kebencanaan.

6) Kemandirian

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat Tim Kampung Siaga Bencana mengedepankan kemandirian masyarakat.

### **2.2.7 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial dengan Bencana dan Pengungsi**

#### **1. Pengertian Pekerjaan Sosial**

Profesi yang memberikan pertolongan pelayanan sosial kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam peningkatan keberfungsian sosial mereka dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial mereka disebut dengan pekerjaan sosial. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki profesi dalam membantu

orang memecahkan masalah-masalah dan mengoptimalkan keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat serta mendekatkan mereka dengan sistem sumber. Pekerja sosial dalam menjalankan tugas berada dalam naungan badan-badan sosial yang bergerak dalam pelayanan-pelayanan sosial. Seorang pekerja sosial dalam menjalankan profesinya bekerja dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang akan diselesaikan, pemilihan teknik dan metode harus tepat guna bagi klien.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberfungsian sosial merupakan maksud dari profesi pertolongan pekerjaan sosial. *International Federation of Social Workers/IFSW* (Edi Suharto 2009:1-2) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

*The social work profession promotes problem solving in human relationship, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments, principles of human rights and social justice are fundamental to social work.*

Pertolongan yang dimaksud adalah secara ilmiah, profesional, dan objektif. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat/NASW (Fahrudin 2012:60), pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut: *“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance a restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals”* (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan).

## 2. Tujuan Pekerjaan Sosial

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang tidak hanya memberikan pertolongan manusia sebatas memungkinkan individu untuk memecahkan masalahnya, akan tetapi lebih berorientasi pada aplikasi hingga pada pencapaian hak-hak hidup masyarakat. Masalah korban bencana alam dan pengungsi merupakan salah satu sasaran dari profesi pekerjaan sosial, maka diharapkan dapat membantu masyarakat agar dapat berfungsi sosial dan melaksanakan peran serta tanggung jawab sosialnya.

Pekerjaan sosial adalah suatu profesi dalam memberikan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu, kelompok, masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas kehidupan melalui identifikasi masalah dan pemecahan masalah sosial yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara diri individu, kelompok, masyarakat dengan lingkungan sosialnya serta untuk mencegah konflik yang mungkin timbul serta memberikan penguatan agar mereka dapat menjalankan keberfungsian sosial mereka sendiri.

Menurut Pincus dan Minahan (1973), tujuan dari pekerja sosial adalah:

1. *Enhance the problem solving and coping capacities of people* (Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah dan menanggulangi masalahnya).
2. *Link people with system that provide them with resources, service, and opportunities* (Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang menyediakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan).

3. *Promote the effective and human operation of these systems* (Meningkatkan pelaksanaan sistem-sistem tersebut secara efektif dan manusiawi).
4. *Contribute to the development and operation of these systems* (Memberikan sumbangan terhadap pembangunan dan kemajuan kebijakan sosial).

#### C. Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Bencana dan Pengungsi

Secara keseluruhan tujuan dari pekerjaan sosial adalah membantu memberikan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat yang mengalami hambatan sosial/keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan seharusnya, mengoptimalkan kemampuan klien dalam menjalankan peran-peran kehidupan, mencarikan alternatif-alternatif untuk pemecahan masalah, mendekatkan klien dengan sistem-sistem sumber, melakukan perubahan-perubahan kondisi di lingkungan/interaksi sosial dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial yang tidak dipergunakan. Keseluruhan dari hal-hal tersebut harus mampu diperankan oleh seorang pekerja sosial (Tukino, 2013).

Pekerjaan sosial dalam bencana sangat diperlukan, karena pekerja sosial membantu kliennya untuk memperoleh kekuatan, keputusan dan tindakan atas kehidupan mereka sendiri dengan mengurangi akibat dari hambatan sosial dan pribadi, meningkatkan kemampuan dan keyakinan diri kepada klien, serta agar dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Tukino (2013), berpendapat bahwa profesi pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Pada saat pra bencana, kontribusi pekerja sosial berfokus pada upaya pengurangan risiko bencana, antara lain melalui kegiatan; peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan

mitigasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, pemetaan kapasitas masyarakat, dan melakukan advokasi ke berbagai pihak terkait kebijakan penanggulangan bencana. Pada saat tanggap darurat, pekerja sosial membantu pemulihan kondisi fisik dan penanganan psikososial dasar bagi korban bencana. Pada saat pasca bencana, pekerja sosial melakukan upaya pemulihan kondisi psikologis korban bencana, khususnya mengatasi trauma dan pemulihan kondisi sosial, serta pengembangan kemandirian korban bencana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan kegiatan *professional* dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, khususnya dalam konteks memberdayakan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pekerja sosial melakukan rangkaian kegiatan penanganan bencana, mulai dari pencegahan, tanggap darurat, evakuasi, rehabilitasi, hingga mitigasi dan pembangunan ulang pasca bencana. Dalam upaya penanganan bencana, pekerja sosial dapat berperan sebagai *enabler*, *broker*, *educator*, *social planner*, dan *advocate*, khususnya jika pekerja sosial berhubungan langsung dengan masyarakat dan melakukan kegiatan intervensi komunitas dalam rangka penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

#### D. Tujuan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Bencana dan Pengungsi

Peran pekerjaan sosial dalam kegiatan penanggulangan bencana sesungguhnya melekat pada setiap tahapan bencana, karena karakteristik utama pekerjaan sosial menekankan individu dan interaksinya dengan lingkungan. Oleh karena itu, peranan pekerjaan sosial sangat penting dalam setting kebencanaan.



Lebih jelasnya, tujuan praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi menurut Tukino (2013), yaitu:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya, dan risiko bencana.
2. Pemerataan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.
3. Membangun sistem penanggulangan bersama masyarakat yang bersifat berkelanjutan.
4. Melakukan advokasi kepada para pihak yang menjadi *stakeholder* mengenai kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi memiliki tujuan agar dapat membantu masyarakat akan adanya ancaman bahaya dari risiko bencana yang ditimbulkan. Pekerjaan sosial juga memiliki peran penting dalam tahapan-tahapan penanggulangan bencana, seperti pada saat pra bencana pekerjaan sosial dapat melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bencana yang akan dihadapi,

#### E. Peran Pekerjaan Sosial dalam Mengatasi Masalah Bencana dan Pengungsi

Secara umum, permasalahan yang dialami korban bencana alam yang terjadi dari pra bencana sampai dengan pasca bencana yang hampir sama, namun model-model pelayanan yang diberikan tidak dapat diseragamkan. Berikut peran-peran yang bisa dilakukan oleh pekerja sosial dalam pengurangan risiko menurut Tukino (2013), yaitu:

### 1. Perancang Program/Perencana Sosial (*Social Planner*)

Setelah mengetahui kondisi yang sebenarnya maka pekerja sosial dapat menentukan rancangan program alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah atau mengembangkan dan merencanakan program dalam upaya pengurangan risiko bencana.

### 2. Fasilitator

Pekerja sosial memfasilitasi pihak penyelenggara penanggulangan bencana bersama pihak terkait untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam pengurangan risiko bencana. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator dengan menyampaikan ide, gagasan, menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu pengurangan risiko bencana.

### 3. Inovator

Pekerja sosial juga dapat menjadi pelopor atau menciptakan kegiatan baru khususnya dalam pengurangan risiko, seperti: penyuluhan kebencanaan, simulasi evakuasi mandiri, edukasi wajib latih bencana, pelatihan mendirikan tenda.

### 4. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial menjadi penghubung antara sistem kegiatan dengan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan. Pekerja sosial dapat menghubungkan pihak penyelenggara penanggulangan bencana dengan pihak terkait yang dapat memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko bencana. Contohnya: menghubungkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ataupun dengan aparat pemerintah.

## 5. Advokat

Pekerja sosial dapat melakukan advokasi terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan rentan terhadap risiko bencana, maka dengan itu pekerja sosial harus dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah melalui program pengurangan risiko bencana.

## 6. Partisipator

Pekerja sosial berperan dengan melibatkan diri dengan kegiatan pengurangan risiko dan kegiatan yang berhubungan dengan bencana serta melibatkan diri dalam menjaga fasilitas umum, sanitasi lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan di daerah rawan bencana.

Pekerja sosial dalam tahapan ini dituntut untuk bisa berempati terhadap program-program pengurangan risiko dan bekerja sama dengan pihak yang terkait. Pekerja sosial tidak bisa menjadi *leading sector* karena dalam semua kasus bencana di Indonesia, peran pemerintah dalam penanggulangan bencana dan penanganan bencana dapat dikatakan lebih dominan. Pekerja sosial bisa menjadi manajer kasus apabila mempunyai data yang lengkap dan akurat mengenai jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dengan memberikan ide dan gagasan tentang rencana program dan kegiatan penanggulangannya yang memungkinkan untuk dilaksanakan serta dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan semua pihak secara terkoordinasi.